

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Sagala, E. C. (2019). *Evaluasi Atas Proses Permohonan Nomor NPWP di KPP Jakarta*. Tangerang Selatan.
- Dama, A., Saerang, D. P. E., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP Terhadap Kepatuhan WP pada KPP Pratama Manado, Indonesia. *Accounting Journal*, vol.1, No.2, pp. 57-62. Retrieved from ejournal.unsrat.ac.id:
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/iaj/article/view/26638/26280>
- Wulandari, D. S. . (2019, November 6). Analisis Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Serta Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Cibitung dengan Peran Account Representative Sebagai Variabel Moderasi. *LLDIKTI Journal*, vol.13, No.2, pp. 94-114. Retrieved from jurnal.lldikti4.or.id:
<https://jurnal.lldikti4.or.id/index.php/jurnalekono/article/view/153/86>
- Kasep, M. (2018). Retrieved from [uinbanten.ac.id](http://repository.uinbanten.ac.id):
<http://repository.uinbanten.ac.id/2025/3/BAB%20II%20OK.pdf>
- Meilisa, A. (2017). Retrieved from repository.unpas.ac.id:
<http://repository.unpas.ac.id/14815/4/Bab%20II.pdf>
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2016). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Medan Kota*. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*. Retrieved from publikasiilmiah.ums.ac.id:
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/bitstream/handle/11617/7307/47%20-%20Heny%20Triastuti%20Kurnia%20Ningsih.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Tata Cara Pendaftaran NPWP*. Retrieved from [kemenkeu](https://www.kemenkeu.go.id): <https://www.kemenkeu.go.id/page/tata-cara-pendaftaran-npwp/>
- Sigit. (2019). *Definisi Kelompok dan Kategori Wajib Pajak*. Diambil kembali dari pajakku:
<https://www.pajakku.com/read/5d5632ca6a0a225035fca393/Definisi-Kelompok-dan-Kategori-Wajib-Pajak>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. (2009). *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. (2008). Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. (2007). Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7. (2021). Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak. (2013). PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian NPWP, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan PKP, Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP, Serta Perubahan Data dan Pemindahan WP.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). PER 04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.

Direktorat Jenderal Pajak. (2020). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER 04/PJ/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP.

Menteri Keuangan. (2020). Peraturan Menteri Keuangan PMK/184/PMK01/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.